BAB III

OBYEK LAPORAN KKL

3.1 Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Garut

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Garut adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Garut. Awal mula pembentukan Bappeda bermula ketika pada tahun 1972 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyempurnaan Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappemda) Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (Bappemko) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (Bappemka), yang merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal serta ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972.

Setelah berjalan 2 tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur. Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II.

Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu:

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional;
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, maka keberadaan lembaga Bappeda di masing-masing daerah disesuaikan dengan tuntutan reformasi dan kebutuhan daerahnya dalam rangka pemenuhan optimalisasi pelayanan kinerja. Terkait dengan hal tersebut, susunan organisasi Bappeda Kabupaten Garut kembali ditetapkan dengan Perda No. 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Garut.

Pemahaman penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah ketika suatu pemerintahan dapat dengan cepat dan tepat mencapai sasaran yang diinginkan serta perencanaan yang baik. Berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Fungsi dan peran Bappeda sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 , ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian

tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dari dua puluh enam urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), Bappeda sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban tiga urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat tiga belas pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala Bappeda, yaitu :

1. Pasal 10, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2. Pasal 11, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah“ ;
3. Pasal 12, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah“;
4. Pasal 14, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah“;

5. Pasal 15, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;
6. Pasal 16, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah“;
7. Pasal 18, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
8. Pasal 20, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
9. Pasal 21, ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10. Pasal 22, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;
11. Pasal 24, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang” ;
12. Pasal 28, ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;
13. Pasal 29, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.

3.2 Gambaran Umum Kabupaten Garut

3.2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Garut

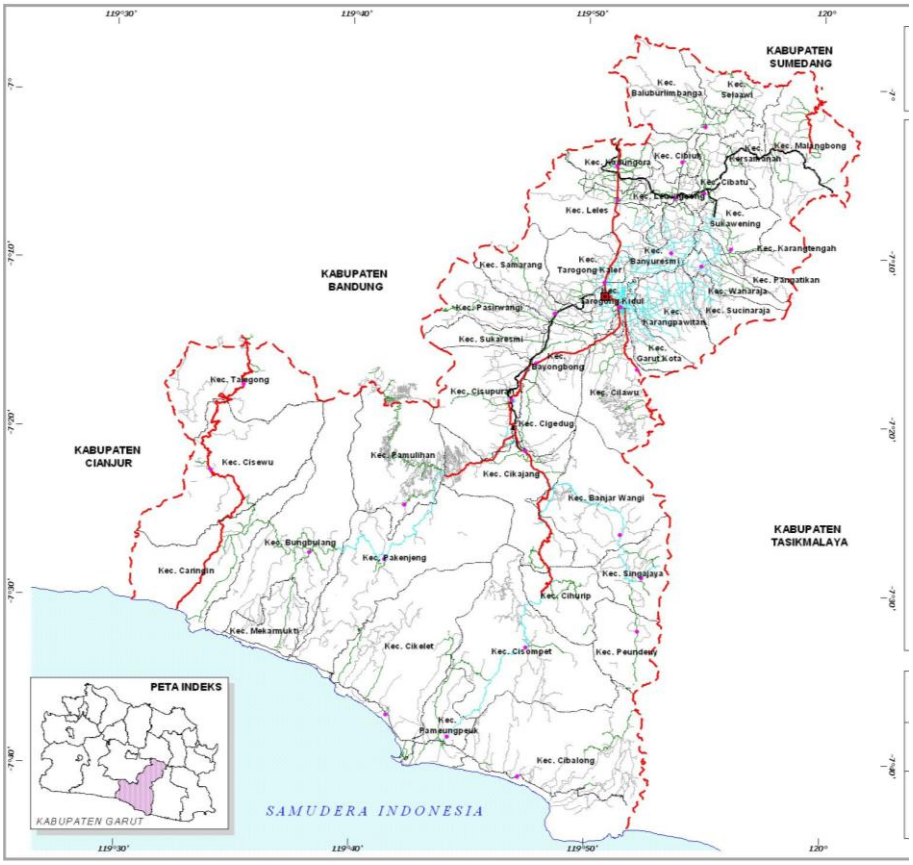
Kabupaten Garut memiliki luas sebesar 306.519 Ha, dengan ibukota kabupaten berada pada ketinggian 717 M Dpl dikelilingi oleh Gunung Karacak (1838 M), Gunung Cikuray (2821 M), Gunung Papandayan (2622 M), dan Gunung Guntur (2249 M) dan secara geografis wilayahnya terletak pada koordinat $6^0$56’49” – $7^0$45’00” Lintang Selatan dan $107^0$25’8” – $108^0$7’30” Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia;
d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur.

Karakteristik topografi Kabupaten Garut beragam, daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan, sedangkan kondisi daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam dan di beberapa tempat labil. Corak alam di daerah sebelah selatan diwarnai oleh iklim Samudra Indonesia dengan memiliki segenap potensi alam dan keindahan pantainya. Kabupaten Garut dengan memiliki iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak dan lahan yang subur serta ditunjang dengan terdapatnya 34 aliran sungai ke Utara, dan 19 aliran sungai ke

Selatan, menyebabkan sebagian besar dari luas wilayahnya dipergunakan untuk lahan pertanian.

Gambar 3.1
Kondisi Fisik Geografis Wilayah



Sumber : *Bappeda Kabupaten Garut, September 2010*

3.2.2 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Secara teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dulu diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi sebuah hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi, serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Berbagai isu regional dan

nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan, hambatan dan tantangan serta mengacu pada isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka isu strategis yang dapat menjadi bahan perumusan kebijakan utama *(core policy)* pembangunan, antara lain sebagai berikut :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia
b. Reformasi Birokrasi dan Tatanan Pemerintahan
c. Penguatan Struktur Perekonomian Daerah
d. Pengembangan infrastruktur kewilayahan dan tata ruang
e. Pengendalian degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
f. Pembangunan kehidupan sosial, politik dan budaya yang demokratis
g. Penanganan dan pengelolaan asset perusahaan daerah
h. Penanganan pembentukan wilayah otonomi baru

Adapun untuk arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk kemandirian ekonomi masyarakat dalam kerangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata, serta pengembangan seni dan budaya daerah, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah dengan didukung oleh pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju masyarakat yang

madani.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Garut serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Daerah pada tahun 2009-2014 adalah : **"**Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik Menuju Ridlo Allah SWT."

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu. Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya: suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik.
2. Garut: satu kesatuan wilayah dan masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Garut.
3. Mandiri dalam Ekonomi: Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan mengelola berbagai potesi sumber daya dalam pembangunan perekonomian.

4. Adil dalam Budaya: Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang secara praporsional dan seimbang membangun kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
5. Demokratis dalam Politik: Sikap dan kondisi pemerintah Kabupaten Garut yang mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Menuju Ridlo Allah SWT: sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang senantiasa meyandarkan segala tindakan dan perbuatan semata-mata untuk mendapat Ridlo Allah SWT.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Garut, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Garut yang mandiri dalam ekonomi, adil dalam budaya dan demokratis dalam politik menuju Ridlo Allah SWT, maka rumusan Misi Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut 2014

ditetapkan dalam 4 (empat) Misi, yaitu:

1. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang.

3.3 Gambaran Umum Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, tata ruang dan pengembangan wilayah, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup telah mencapai kemajuan. Diantaranya hasil pencapaian dari kondisi pembangunan Kabupaten Garut dapat diuraikan sebagai berikut.

3.3.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan daerah bidang sosial budaya dan kehidupan beragama berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Garut. Kondisi tersebut tercermin pada kuantitas penduduk

dan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni budaya, dan keagamaan. Pembangunan kualitas hidup penduduk Kabupaten Garut tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Pada Tahun 2008, IPM Kabupaten Garut mencapai angka 70,61 poin, meningkat sebesar 0,62 poin atau 0,89% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,99 poin. Dalam rentang waktu tahun 2004-2008, IPM Kabupaten Garut meningkat sebesar 3,31 poin atau 4,92% dari angka 67,3 poin pada Tahun 2004 menjadi 70,61 poin pada Tahun 2008.

Dalam rentang waktu yang sama, Indeks Pendidikan meningkat sebesar 2,16 poin atau 2,7%, dari 80,01 poin (Angka Perbaikan) pada Tahun 2004 menjadi 82,17 poin (Angka Sangat Sementara) pada Tahun 2008; Indeks Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1,83 poin atau 2,87%, dari 63,83 poin (Angka Perbaikan) pada Tahun 2004 menjadi 65,66 poin (Angka Sangat Sementara) pada Tahun 2008; dan Indeks Daya Beli sebesar 6,17 poin atau 10,63%, dari 58,06 poin (Angka Perbaikan) pada Tahun 2004 menjadi 64,23 poin (Angka Sangat Sementara) pada Tahun 2008. Disamping beberapa kemajuan yang telah berhasil dicapai, tentu saja masih terdapat beberapa hal yang memerlukan upaya yang lebih keras, karena apabila dibandingkan dengan pencapaian

IPM Provinsi Jawa Barat, kondisi IPM Kabupaten Garut sampai Tahun 2007 masih terpaut 0,77 poin (Angka Perbaikan) dibawah IPM Jawa Barat yang sudah mencapai 70,76 poin, dengan capaian indeks kesehatan masih terpaut 5,33 poin (Angka Perbaikan), sementara indeks pendidikan dan indeks daya beli sudah diatas Jawa Barat dengan selisih masing-masing sebesar 0,57 poin (Angka Perbaikan) dan 2,43 poin (Angka Perbaikan). Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Garut sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun masih sedikit berada di bawah rata-rata capaian Jawa Barat.

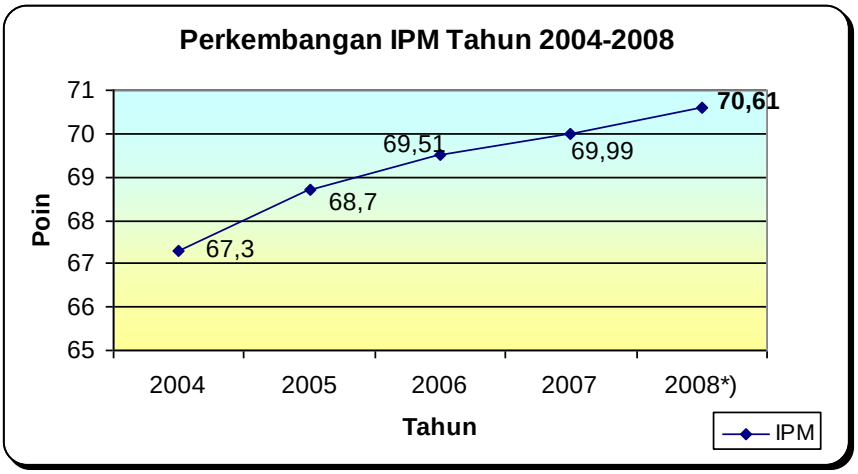
Pencapaian IPM yang masih berada di bawah rata-rata capaian Jawa Barat pada umumnya, menggambarkan kondisi pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama terkait dengan permasalahan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Kabupaten Garut.

Tabel 3.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Tahun 2004-2008

NO	INDIKATOR	Sasaran RPJMD Tahun 2008	Pencapaian					% Capaian Thn 2008 dgn sasaran RPJMD
			2004	2005	2006	2007	2008*)	
1	**IPM**	**69,44**	**67,3**	**68,7**	**69,51**	**69,99**	**70,61**	**101,68**
A	**Indeks Pendidikan**	**82,52**	**80,01**	**80,44**	**81,6**	**81,7**	**82,17**	**99,29**
	Angka Melek Huruf (%)	99,43	97,7	98	98,86	98,89	98,98	99,55
	Rata-Rata Lama sekolah (tahun)	7,3	6,7	6,8	7,06	7,1	7,17	98,22
B	**Indeks Kesehatan**	**65,63**	**63,83**	**64,17**	**65,23**	**65,7**	**65,66**	**100,05**
	Angka Harapan Hidup (tahun)	64,38	63,3	63,5	64,14	64,42	64,4	100,03
C	**Indeks Daya Beli**	**60,16**	**58,06**	**61,49**	**61,69**	**62,56**	**64,23**	**106,77**
	Kemampuan Daya Beli (000 Rp)	560,34	611,23	626,1	626,93	630,72	637,95	113,85

Sumber : *BPS Kabupaten Garut, Januari 2009, *) Angka Sangat Sementara*

Gambar 3.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2004-2008



*Sumber : BPS Kabupaten Garut, Januari 2009, *) Angka Sangat Sementara*

A. Penduduk Kabupaten Garut

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut sampai tahun 2008 tercatat sebanyak 2.345.108 jiwa (angka sementara) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.192.201 jiwa dan perempuan sebanyak 1.152.907 jiwa, meningkat dari tahun 2004 mencapai 2.204.175 jiwa. Dengan luas wilayah 3.065,19 Km^2, tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2008 diproyeksikan mencapai rata-rata sebesar 765,08 jiwa/ km^2 mengalami peningkatan rata- rata sebanyak 45 orang per km^2 atau sekitar 6,39% bila dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2004 mencapai sebesar 719,10 orang per km^2.

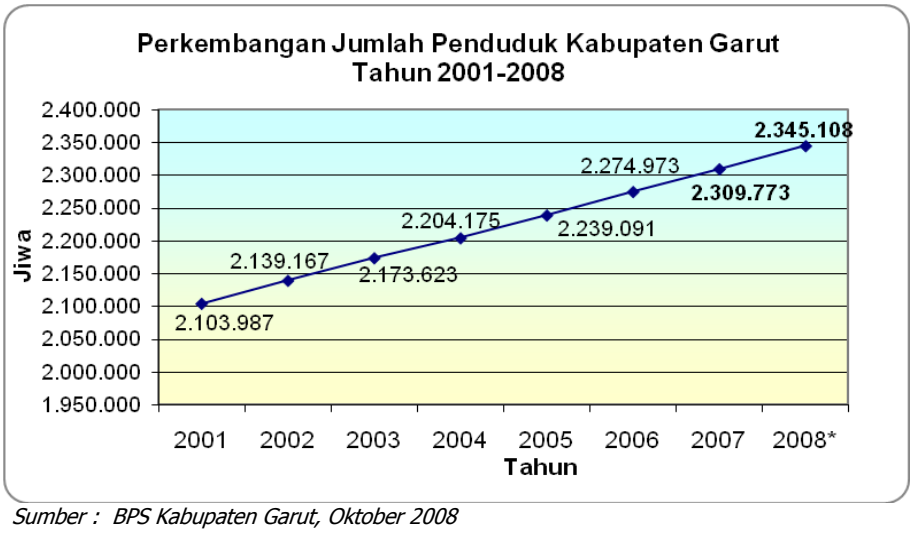
Tabel 3.2
Perkembangan Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2004-2008

Penduduk	2004	2005	2006	2007	2008
Jumlah (Jiwa)	2.204.175	2.239.091	2.274.973	2.309.773	2.345.108
Laki-laki (Jiwa)	1.121.283	1.139.046	1.157.252	1.174.800	1.192.201
Perempuan (Jiwa)	1.082.892	1.100.045	1.117.721	1.134.973	1.152.907
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,41	1,58	1,60	1,53	1,53

Kepadatan per KM^2	719,10	730,49	742,20	753,55	765,08
Angka Fertilitas (TFR)	2,23	2,19	2,18	2,14	2,11

Sumber : BPS Kab. Garut, 2008

Gambar 3.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Garut
Tahun 2001-2008



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Oktober 2008

Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, baik alami maupun migrasi masuk, dilakukan secara terus menerus. Selama periode tahun 2004-2008, jumlah penduduk meningkat sebanyak 6,39% dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sedikit meningkat dari 1,41% pada Tahun 2004 menjadi 1,53% pada Tahun 2008. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Garut tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan penduduk alami dibandingkan dengan migrasi masuk, meskipun angka fertilitas (Angka Kelahiran Penduduk Perempuan Pernah Kawin) pada periode 2004-2008 cenderung menurun, yaitu dari sebesar 2,23% pada Tahun 2004 dan diproyeksikan mencapai 2,11% pada tahun 2008.

Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan terakhir, berdasarkan data BPS Kabupaten Garut, sampai dengan tahun 2008 prosentase terbesar penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, adalah memiliki ijazah/STTB SD/MI/sederajat sebanyak 39,83% sementara pada Tahun 2007 prosentase terbesar penduduk yang memiliki ijazah/STTB SD/MI/sederajat sebanyak 40,04% dan pada Tahun 2006 sebanyak 39,93%. Sedangkan yang memiliki ijazah/STTB SLTP/MTs/sederajat/ kejuruan pada tahun 2008 sebanyak 15, 34%, sementara pada tahun 2007 sebanyak 15,98% dan pada Tahun 2006 sebanyak 15,36%. Penduduk dengan ijazah/STTB SMU/MA/sederajat pada tahun 2008 sebanyak 14,45% sedikit meningkat dari tahun 2007 sebanyak 14,24%, sementara Tahun 2006 sebanyak 14,32%. Untuk ijazah/STTB SM kejuruan mengalami kecenderungan yang terus meningkat selama periode tahun 2006-2008, dimana pada tahun 2008 mencapai 4,54% yang meningkat dari 4,32% pada Tahun 2007, sementara pada tahun 2006 sebesar 4,28%. Untuk lulusan Perguruan Tinggi tingkat diploma I/II sedikit meningkat dari 1,10% pada Tahun 2006 menjadi 1,23% pada Tahun 2008 dan untuk tingkat Diploma III/IV, S1, S2 dan S3 mengalami peningkatan dari 1,53% pada Tahun 2006 menjadi 1,66% pada Tahun 2008. Peningkatan tingkat pendidikan terakhir ini menunjukkan secara tidak langsung terjadinya peningkatan derajat pendidikan penduduk di Kabupaten Garut selama periode tahun 2006-2008.

Tabel 3.3
Prosentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas
Menurut Ijazah/STTB yang dimiliki Tahun 2006-2008

Ijazah/STTB Yang dimiliki	2006	2007	2008
Tdk/Belum bersekolah	2,08	2,01	1,99
Tdk punya ijazah SD	21,50	20,64	20,97
SD/MI/sederajat	**39,93**	**40,04**	**39,83**
SLTP/MTs/sederajat/kejuruan	15,36	15,98	15,34
SMU/MA/sederajat	14,32	14,24	14,45
SM kejuruan	4,28	4,32	4,54
Diploma I/II	1,01	1,10	1,23
Diploma III/IV, S1, S2 dan S3	1,53	1,67	1,66

Sumber : BPS Kab. Garut, Oktober 2008

Dilihat dari lapangan kerja, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung paling banyak tenaga kerja yaitu sebanyak 32,57%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sebanyak 27,75%, sektor industri pengolahan sebanyak 14,71% dan sektor jasa sebanyak 13,04%. Untuk mengetahui keadaan penduduk Kabupaten Garut Tahun 2004-2008 yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Persentase Penduduk Kabupaten Garut yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008*
Pertanian	40,28	30,85	31,99	31,45	32,57
Pertambangan dan Penggalian	0,16	0,38	0,79	0,82	0,83
Industri Pengolahan	10,42	14,14	13,15	13,58	14,71
Listrik, gas dan air minum	0,23	0,26	0,53	0,53	0,54
Konstruksi	4,74	4,29	3,61	3,65	3,66
Perdagangan	22,16	26,63	26,23	26,63	27,75
Angkutan dan Komunikasi	8,24	8,29	7,06	6,65	5,63
Keuangan	0,31	1,1	1,96	1,96	1,27
Jasa-jasa Lainnya	13,45	14,07	14,68	14,72	13,04

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2008

Perkembangan Penduduk Miskin selama periode tahun 2004-2008, proporsinya memiliki tren yang berfluktuatif, berdasarkan hasil pendataan

BPS yang telah diolah dengan mengaitkan metode Garis kemiskinan hasil SUSENAS, pada bulan September 2005 (sesaat sebelum kenaikan BBM) jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 336.076 jiwa yang mengalami penurunan sebesar 0,66% atau sekitar 2.224 jiwa dibandingkan Tahun 2004 yang mencapai 338.300 jiwa atau secara proporsi menurun dari 15,35% dari total penduduk pada Tahun 2004 menjadi 15,01% dari total penduduk pada Tahun 2005. Namun demikian, kenaikan BBM dengan rata-rata sebesar 125% pada Oktober 2005 telah memicu kenaikan harga-harga (inflasi) sampai pada level 17% lebih di Tahun 2005 yang mengakibatkan peningkatan kembali jumlah penduduk miskin pada Tahun 2006 sebesar 8,06% atau sekitar 27.072 jiwa menjadi sekitar 363.148 jiwa (angka sementara) dengan proporsi sebesar 15,96% dari total penduduk di Kabupaten Garut. Walaupun demikian, program BLT/SLT yang direalisasikan sejak Oktober 2005, tampak cukup efektif menjadi tameng untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah sehingga kenaikan penduduk miskin terlihat tidak terlalu mencolok atau di bawah rata-rata kenaikan penduduk miskin di Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 11,25% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni semula 35,10 juta jiwa menjadi 39,05 juta jiwa. Pada Tahun 2007 jumlah penduduk miskin diperkirakan sebanyak 361.835 jiwa, atau menurun 0,36% dari Tahun 2006 dengan prosentase jumlah penduduk miskin sebanyak 15,67% dari total penduduk. Sementara pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin diproyeksikan sebanyak 359.289 jiwa

atau menurun 0,7% dengan prosentase sebanyak 15,32% dari total penduduk.

Selain itu menunjukkan pula bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang telah diluncurkan oleh pemerintah baik pusat (seperti pogram BLT, Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, P2KP), propinsi (seperti Program Raksadesa, Dakabalarea) maupun Pemerintah Kabupaten, belum terpadu sehingga tidak terjadi sinergitas dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin.

Tabel 3.5
Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Garut
Tahun 2002-2008

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Kenaikan (%)	Prosentase terhadap penduduk	Status Data
2002	323.700	-	15,13	Angka Tetap
2003	338.700	4,63	15,58	Angka Tetap
2004	338.300	-0,12	15,35	Angka Tetap
Sept 2005 *)	336.076	-0,66	15,01	Angka Estimasi
Mei 2006 **)	363.148	8,06	15,96	Angka Estimasi
2007***	361.835	-0,36	15,67	Angka Estimasi
2008***	359.289	-0,70	15,32	Angka Proyeksi

Sumber Data: Bappeda, Desember 2008
*Catatan : *) Hasil pendataan awal PSE05 (sebelum kenaikan BBM)*
***) Hasil Pemutakhiran PSE05 sampai 31 Mei 2006*

B. Pendidikan Masyarakat Kabupaten Garut

Pencapaian nilai Indeks Pendidikan dipengaruhi oleh pencapaian nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dimana sampai dengan Tahun 2004 RLS masih sebesar 6,8 tahun atau rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Garut adalah tidak tamat SLTP atau baru tamat SD. Tahun 2008 RLS diproyeksikan mencapai 7,17 tahun (angka sangat sementara), hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,47 tahun atau 7,01% dibanding Tahun 2004.

Bersamaan dengan itu, Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 1,28% dari 97,70% pada Tahun 2004 menjadi 98,98% (angka sangat sementara) pada Tahun 2008. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sampai dengan Tahun 2008 telah terjadi peningkatan terhadap kemampuan baca masyarakat Kabupaten Garut. Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Garut untuk usia 7-12 tahun pada tahun 2008 mencapai 99,61%, meningkat dari tahun 2007 sebesar 95,39%. Sementara APS untuk usia 13-15 tahun pada tahun 2008 mencapai 83,43%, meningkat dari tahun 2007 sebesar 70,32%.

Apabila ditinjau dari jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah siswa, maka rasio jumlah guru dan murid pada tahun 2008 belum memperlihatkan perubahan yang berarti dibandingkan dengan 2007, yaitu Rasio guru terhadap murid untuk jenjang TK sebanyak 1 orang guru berbanding 12 murid TK, Rasio terhadap murid SD sebanyak 1 guru berbanding 30 murid, Untuk SMP sebanyak 1 guru berbanding 15 murid, untuk SMA sebanyak 1 guru berbanding 12 murid, dan untuk SMK sebanyak 1 guru berbanding 12 murid.

Tabel 3.6
Rasio Jumlah Guru dan Murid

No	Jenjang	Tahun 2007	Tahun 2008
1	TK	12	12
2	SD	27	30
3	SMP	18	15
4	SMA	14	12
5	SMK	11	12

Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2007; Tahun 2008 merupakan angka estimasi

C. Kesehatan Mayarakat Garut

Angka Harapan Hidup sebagai suatu variabel dalam indeks pembangunan manusia, akan berkaitan erat dengan Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan kondisi eksisting, memberikan indikasi bahwa kebijakan pembangunan masih belum cukup berhasil dalam menekan masih tingginya tingkat kematian bayi, sekalipun demikian terjadi penurunan angka kematian sebesar 6,29% dari 55,94 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi sebesar 52,42 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2008. Disisi lain, Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami penurunan 13,47% dari sebesar 264/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi sebesar 228,43/100.000 kelahiran hidup (Angka Sangat Sementara) pada tahun 2008.

Disamping itu masih adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung dari 46 jumlah kasus suspect Flu Burung tercatat 4 orang yang meninggal dunia. Kasus HIV positif sebesar 24 penderita dan AIDS sebesar 6 orang penderita dan meninggal dunia (jumlah kumulatif kematian pada tahun 2008 sebanyak 10 orang). Faktor lain yang mempengaruhi indikator kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar, diantaranya perkembangan sarana pelayanan kesehatan sampai tahun 2008 menunjukan pertumbuhan positif, yang tergambar dari meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana pelayanan kesehatan. Secara kualitas, kondisi bangunan puskesmas dalam kondisi baik sebanyak 84,13%, kondisi bangunan perawatan dalam kondisi baik sebanyak 61,54%, kondisi sarana puskesmas keliling dalam kondisi baik sebanyak

87,50%, dan kondisi bangunan puskesmas pembantu dalam kondisi baik sebanyak 78,95%. Dari sisi kuantitas, jumlah puskesmas yang di rehabilitasi pada tahun 2008 berjumlah 8 puskesmas dari 63 puskesmas yang ada. Upaya pemerataan kualitas pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan terutama pada kecamatan-kecamatan yang memiliki indikator Angka Harapan Hidup berada di bawah rata-rata Kabupaten Garut.

Tabel 3.7
Perbandingan Rekapitulasi Kondisi Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2006-2008

Tahun	Kondisi	Sarana Pelayanan Kesehatan			
		Puskesmas	Bangunan Perawatan	Puskesmas Keliling	Puskesmas Pembantu
Kondisi 2006	Baik	36	5	23	60
	Rusak Ringan	19	4	1	42
	Rusak Berat	7	5	7	22
	Jumlah	62	14	31	124
Kondisi 2007	Baik	45	6	28	85
	Rusak Ringan	18	4	1	37
	Rusak Berat	0	3	7	7
	Jumlah	63	13	36	129
Kondisi 2008	Baik	53	8	56	105
	Rusak Ringan	10	3	-	28
	Rusak Berat	0	2	8	-
	Jumlah	63	13	64	133
Proporsi Kondisi (%)	Baik	84,13	61,54	87,50	78,95
	Rusak Ringan	15,87	23,08	-	21,05
	Rusak Berat	-	15,38	12,50	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, oktober 2008

Sementara itu dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, dengan perkembangan tenaga kesehatan sampai tahun 2008 relatif mengalami peningkatan, diantaranya jumlah tenaga medis dokter umum mencapai sebanyak 96 orang dimana 68 orang diantaranya tersebar di setiap puskesmas dari kebutuhan sebanyak 76

Jumlah dokter spesialis sebanyak 21 orang, tenaga kesehatan lainnya meliputi tenaga perawat sebanyak 1.345 orang dari kebutuhan sebanyak 1428 orang, tenaga farmasi sebanyak 71 orang dari kebutuhan sebanyak 98, tenaga teknis medis sebanyak 45 orang dari kebutuhan sebanyak 94 orang, tenaga gizi sebanyak 34 orang dari kebutuhan sebanyak 75 orang, tenaga sanitasi sebanyak 59 orang dari kebutuhan sebanyak 68 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 50 orang dari kebutuhan sebanyak 86 orang dan bidan sebanyak 541 orang dari kebutuhan sebanyak 571 orang.

3.3.2 Perekonomian Daerah Kabupaten Garut

Struktur perekonomian di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh ragam kegiatan ekonomi yang memberikan karakter di wilayah yang bersangkutan. Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat menentukan struktur perekonomian daerah. Struktur ekonomi Kabupaten Garut secara kuantitatif digambarkan melalui prosentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sampai dengan tahun 2008, perekonomian Kabupaten Garut masih diberi warna yang dominan oleh sektor pertanian, yakni dengan kontribusi pembentukan nilai tambah sebesar 47,14% terhadap PDRB, disusul oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 25,89%, sementara kontribusi dari sektor lainnya dibawah 10%. Hal ini dapat dipahami karena sektor pertanian dengan pengelolaan yang cenderung masih tradisional, tidak

tergantung pada bahan impor dan berbasis teknologi sederhana, merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PDRB pada periode Tahun 2004-2008 mengalami kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2004 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp.11,32 trilyun (Angka Perbaikan) dan diproyeksikan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar Rp 9,7 trilyun atau 85,67% menjadi sebesar Rp.21,02 trilyun (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Garut selama periode Tahun 2004-2008. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi sebesar 13,26% pada Tahun 2008 yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 3.8
Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2004-2008

URAIAN	TAHUN				
	2004	2005	2006	2007	2008*
PDRB adh berlaku (juta Rp)	11.323.785	13.697.884	15.890.281	17.715.224	21.025.302
Kontribusi sektor pertanian (%)	50,7	50,05	47,91	47,9	47,14
Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran (%)	24,64	25,29	25,89	25,96	25,89

Sumber : BPS Kab. Garut, Januari 2009, *) Angka Sangat Sementara

Dalam periode tahun 2004-2008, kondisi perekonomian makro Kabupaten Garut mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan,

dengan LPE diproyeksikan Tahun 2008 mencapai sebesar 4,79% dibandingkan dengan Tahun 2004 sebesar 4,01% (Angka Perbaikan) atau lebih tinggi 0,78%. Perkembangan positif dari perekonomian di Kabupaten Garut tersebut tidak lepas dari peningkatan kinerja pada sektor yang sangat dominan di wilayah ini, yaitu sektor pertanian dan perdagangan yang yang diproyeksikan mampu tumbuh masing-masing sebesar 4,19% dan 4,18%, yang juga didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga, meningkatnya perdagangan dalam dan luar negeri, konsumsi serta bertambahnya kegiatan investasi.

Hal yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi, meskipun mengalami perkembangan yang berfluktuatif dimana Inflasi pada tahun 2004 tercatat sebesar 5,92% (Angka Regional) dan pada tahun 2008 diproyeksikan mencapai sebesar 13,26% (angka sangat sementara) sebagai dampak yang dirasakan akibat kenaikan BBM pada bulan Juni 2008, atau lebih tinggi 7,34%.

Tabel 3.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2004-2008

URAIAN	TAHUN				
	2004	2005	2006	2007	2008*
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,01	4,16	4,11	4,76	4,79
LPE Sektor Pertanian (%)	3,62	4,4	0,33	3,89	3,43
LPE Sektor Perdagangan (%)	4,14	4,94	7,9	6,55	5,17
LPE Sektor Industri (%)	5,27	5,15	8,53	7,93	9,41
Inflasi (%)	5,92	20,83	8,44	7,72	13,26

Sumber : BPS Kab. Garut, Januari 2009, *) Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan Investasi yang ditanamkan melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pada

periode Tahun 2004–2008, memperlihatkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini memberikan sinyalemen bahwa iklim investasi di Kabupaten Garut, cukup memberikan peluang para pemodal untuk menanamkan investasinya. Namun masih memberikan indikasi bahwa investasi yang cukup besar tersebut, belum sepenuhnya dapat memberikan efek langsung dalam meningkatkan kualitas dan menyerap sumber daya manusia daerah.

Tabel 3.10
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) dan Laju Investasi Tahun 2004-2008

URAIAN	TAHUN				
	2004	2005	2006	2007	2008*
Pembentukan Modal Tetap Broto (PMTB) a.d.h.Berlaku (Milyar Rp.)	1.796,32	1.983,70	2.293,70	2.462,37	2.922,46
Laju Investasi (%)	22,03	10,43	15,63	7,35	18,68

Sumber : BPS Kab. Garut, Januari 2009, *) Angka Sangat Sementara

Pendapatan perkapita yang merupakan gambaran daya beli masyarakat, sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraannya bertambah baik. Sebaliknya penurunan pendapatan per kapita berarti tingkat kesejahteraannya semakin menurun. Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2004 PDRB perkapita Kabupaten Garut masih mencapai Rp.5.137.426 (Angka Perbaikan), dan pada tahun 2008 diproyeksikan mencapai Rp. 8.965.603 atau meningkat sebesar 74,52% selama Tahun 2004-2008. Kendati demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli

masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak mutlak merata. Namun, pendapatan per kapita yang didekati oleh PDRB per Kapita dapat menggambarkan nilai produk yang dihasilkan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun. Atau dapat pula diartikan sebagai tingkat produktifitas penduduk yang juga dapat merefleksikan tingkat pendapatan per penduduk di Kabupaten Garut.

Pada tahun 2008 pendapatan perkapita Kabupaten Garut atas dasar harga berlaku diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 16,90% atau dari semula Rp 7.669.678 menjadi Rp 8.965.603, namun daya beli masyarakat secara riil diproyeksikan hanya meningkat sebesar 3,21% yang tercermin dari peningkatan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Kondisi tersebut mencerminkan cukup tingginya inflasi yang terjadi pada tahun 2008 sehingga mengkoreksi peningkatan daya beli yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan yang diterima. Kendati demikian, daya beli masyarakat Kabupaten Garut di sepanjang periode 2001-2008 terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 3,21%, sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2003 yang hanya meningkat 1,07%. Perkembangan PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan tersebut sering pula dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Tabel 3.11
Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut Tahun 2000-2008

Tahun	Harga Berlaku (Rp)	Kenaikan (%)	Harga Konstan (Rp)	Kenaikan (%)
2000	3.538.847		3.538.847	
2001	3.937.065	11,25	3.603.168	1,82
2002	4.336.308	10,14	3.684.100	2,25
2003	4.617.847	6,49	3.723.688	1,07
2004	5.137.426	11,25	3.819.318	2,57
2005	6.117.609	19,08	3.916.058	2,53
2006*	6.984.822	14,18	4.012.710	2,47
2007**	7.669.678	9,80	4.140.288	3,18
2008**	8.965.603	16,90	4.273.230	3,21

Sumber BPS Kab. Garut, Januari 2009

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan pasca krisis tahun 1997, ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor Pertanian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Industri Pengolahan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran.